



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DPR RI**

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	1
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Rabu, 24 Juni 2020
Waktu	:	13.00 WIB – 14.38 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat BAKN
Acara	:	Dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan kebijakan pengelolaan subsidi energi BBM dan gas.
Ketua Rapat	:	Marwan Cik Asan
Sekretaris Rapat	:	Mardi Harjo, S.E., M.Si.
Hadir Anggota	:	ANGGOTA BAKN DPR Republik Indonesia F-P. DEMOKRAT (MARWAN CIK ASAN) F-PKS (AHMAD SYAIKHU) F-PAN (AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E) F-P. GOLKAR (H.M MISBAKHUN, SE., M.H) F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E)

JALANNYA RAPAT:
KETUA RAPAT/F-D (MARWAN CIK ASAN):

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh
Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama marilah kita bersyukur ke hadirat Allah SWT Tuhan yang maha kuasa yang karena limpahan nikmat dan karunianya kita hari ini *alhamdulillah* dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat di ruang rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa menurut peraturan tata tertib No. 1 tahun 2020 Pasal 254 ayat 4 menyatakan bahwa semua jenis rapat yang dihadiri oleh anggota kecuali dalam keadaan tertentu yaitu keadaan bahaya, kegentingan memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Kemudian berdasarkan data dari Sekretariat BAKN bahwa pada saat ini sudah hadir bersama kita Pimpinan dan anggota BAKN 4 orang dari total 9 orang. Baru 4 ya? Berarti kita ini belum kuorum dong? Oh RDPU tidak perlu kuorum ya. Dan sesuai dengan ketentuan karena RDPU ini tidak diperlukan kuorum rapat maka dengan ini rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.10 WIB)

Pimpinan dan anggota BAKN yang terhormat.
Saudara Ketua dan Pimpinan Hiswana Migas yang saya hormati.

Kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Ketua dan juga para Pimpinan lain sudah berkenan hadir untuk bersama-sama kami semua untuk melaksanakan tugas konstitusi DPR RI khususnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang mana tugasnya tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2018 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MD3 dimana salah satu tugas dari BAKN adalah untuk melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR.

Sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan yang hadir pada siang hari ini. Saya Marwan Cik Asan, Ketua BAKN dari Fraksi Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Lampung II. Kemudian di sebelah kiri saya Ahmad Syaikh Wakil Ketua dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Jawa Barat VII. Kemudian yang hadir Pak Najib Qodratullah anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Daerah Jawa Barat II. Dan Pak Muhammad Misbakhun anggota dari Fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan Jawa Timur II. Lima orang lainnya akan menyusul secara fisik virtual.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Kami sudah mengirimkan TOR kepada Hiswana Migas baik berupa pertanyaan maupun paparan. Untuk mempersingkat waktu karena ini lagi masa Corona ini enggak boleh lama-lama Pak rapatnya, maka kami persilakan kepada Ketua Hiswana Migas untuk memberikan penjelasan terkait topik kita hari ini adalah

mengenai telaah BAKN Akuntabilitas Keuangan Negara terhadap subsidi energi, baik itu energi Migas, maupun listrik kalau tidak salah. Saya persilakan Pak.

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pak Marwan selaku Pimpinan BAKN dan Pak Syaikh, juga Pak Najib dan Pak Wisnu, Misbakhun.

Maaf Pak.

Jadi kami dari Hiswana Migas pertama-tama kami terima kasih atas undangan untuk hadir pada rapat pada siang hari ini. Sedikit kami akan sampaikan Hiswana Migas itu organisasi seperti apa. Jadi di Pertamina khususnya di Direktorat Hilirnya Pak, itu mempunyai beberapa mitra kerja. Nah mitra kerja ini menjadi anggota dari pada Hiswana Migas. Ada pun bidang usaha-bidang usaha di keanggotaan kami itu yang terkait dengan subsidi itu ada di SPBU dan agen LPG PSO, atau agen LPG 3kg.

Kemudian dari sisi struktur organisasi kita di DPP (Dewan Pimpinan Pusat) yang skalanya nasional. Kemudian di bawahnya ada DPD (Dewan Pimpinan Daerah) yang luas wilayahnya mencakup sama dengan Pertamina MOR (Marketing Operational Region). Jadi ada 8 DPD dan di bawah DPD ada DPC. DPC ini bisa satu atau beberapa kota, itu ada 65 DPC.

Terkait dengan rapat pada siang hari ini, yang utama adalah SPBU dan agen LPG. Mungkin kita akan sedikit sampaikan untuk SPBU. Jumlah SPBU kami sekitar 7000 Pak, 5700 itu SPBU yang reguler. Kemudian yang 1300 itu SPBU yang mini, yang kecil, baik itu SPBU yang 3T maupun SPBU nelayan. Kemudian kalau di keagenan LPG itu ada sekitar 4000 agen LPG PSO di seluruh Indonesia.

Mengenai efektivitas dari pada penyaluran subsidi ini kami lihat sampai saat ini memang pada prinsipnya sudah cukup bagus Pak, tapi dikarenakan adanya geografis dari pada Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, itu yang membuat kadang-kadang ada pelayanan yang agak kesulitan untuk mendapatkan barang-barang subsidi baik BBM maupun LPG. Akan tetapi, untuk BBM dengan adanya program kemarin SPBU 3T, Terdepan, Terpencil dan Terluar itu cukup membantu untuk mencapai konsumen-konsumen atau masyarakat yang di daerah yang terpencil yang tidak terjangkau oleh SPBU reguler.

Sedangkan untuk LPG 3 kg memang agak sulit dikarenakan untuk pengangkutannya harus menggunakan (suara tidak jelas) sendiri, itu kemudian ada tambahan lagi untuk mobil angkutan khusus untuk mengangkut LPG ke daerah ini memang agak sulit. Jadi di daerah-daerah terpencil masih ada sebagian yang menggunakan minyak tanah. Mungkin itu dari sisi penyalurannya. Kalau efektivitas masih efektif Pak.

Nah yang utama mungkin kendala yang kita hadapi dari sisi efektivitas penyaluran tadi. Kalau dibilang subsidi-subsidi itu tercapai enggak ke sasaran, saat ini memang kita melihat adanya sedikit hambatan atau kendala di kita, itu satu tadi letak geografis. Yang kedua, adanya selisih harga antara yang disubsidi dan yang tidak disubsidi. Nah ini yang bisa membuat pihak-pihak tertentu untuk

menyalahgunakan barang-barang subsidi tersebut. Mungkin itu Pak sekedar awal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Rachmad Muhammadiyah. Tapi Bapak NU katanya?

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

Yang *ngasih* nama Bapak saya.

KETUA RAPAT:

Iya saya pikir penjelasannya cukup ringkas ya dan memang kita kan akan lebih banyak menggali dari diskusi yang terkait dengan efektivitas subsidi ini diterima oleh rakyat. Ini yang paling penting yang harus kita diskusikan pada siang hari ini. *Monggo* silakan mungkin dari meja Pimpinan dulu? Anggota dulu? Pak Najib dulu, silakan.

F-PAN (AHMAD NAJIB QODRATULLAH, SE.):

Baik terima kasih.

Pimpinan BAKN yang saya hormati, serta Anggota dan Seluruh jajaran dari Hiswana Migas yang hadir pada kesempatan hari ini.

Sebagai pembuka pertanyaan saja perlu barang kali nanti bisa saling melengkapi. Kita kalau mendengarkan paparan singkat tadi, cukup jelas dan sepertinya seperti biasa, begitu. Alasan atau dokumentasi yang disampaikan bahwa mulai dari pendistribusian, kendala-kendala termasuk jalur logistik yang tersedia. Ada hal yang ingin saya sampaikan dimana bahwa negeri ini sudah merdeka puluhan tahun dan selalu menghadapi permasalahan yang sama selama puluhan tahun.

Kita sering dengar bahwa menjelang hari besar hari raya, kelangkaan stok jelas yang juga berimplikasi kepada harga. Itu sesuatu yang terjadi, biasa yang masyarakat harus hadapi dari tahun ke tahun. Memang dalam 2, satu tahun terakhir ini kalau di Dapil saya di Jawa Barat II di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sudah relatif tidak begitu nampak hal itu, artinya dari sisi ketersediaan sedikit ada perbaikan dalam berapa tahun terakhir. Tapi kalau kita bicara dengan daerah-daerah tertentu yang mungkin dari sisi akses transportasi logistik dan seterusnya itu masih terkendala, otomatis juga akan memunculkan kendala tersendiri bagi penyaluran dan ketersediaan dari BBM dan gas ini.

Pertanyaannya, sejauh ini dengan berbagai permasalahan tadi yang muncul terutama di beberapa daerah yang masih merasakan betul dampaknya, ini Hiswana ini seperti apa? Kan tidak mungkin Pak. Saya bilang negeri ini merdeka sudah puluhan tahun menghadapi hal yang sama yang kemudian dampaknya itu implikasinya itu ke mana-mana Pak. Dari harga gas yang, atau BBM yang tidak terjamin dari harga misalnya karena *supply* nya rendah. Itu dampaknya kan ke mana-mana secara ekonomi. Harga barang-barang menjadi naik dan seterusnya.

Nah maksud saya, tolong berikan kepada kami juga jangan selalu alasannya itu Pak. Hal yang sama selalu disampaikan. Kreativitas dan inovasi yang Hiswana tunjukkan ini harus lebih dari apa yang sudah didapat hari ini. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Rata-rata sih kalau saya lihat Pak, di kelangkaannya, stoknya. Kalau hal-hal lain rasanya sudah tidak terlalu terkendala. Dan terakhir, masyarakat walaupun tidak di ranah Bapak, dengan harga Pak terutama BBM kok katanya kalau di berita-berita di luar negeri dan sebagainya harganya sudah pada turun, di kita belum. Itu juga belum ranah Bapak ya.

Kira-kira Bapak yang tahu persis di jalur perniagaan seperti apa? Apakah bisa koreksi harga atau tidak? Dan terakhir, karena kita dalam suasana menghadapi Covid-19 ini di Hiswana sendiri seperti apa? Apakah permintaan tinggi dalam situasi begini apa tidak? Karena tinggi rendahnya permintaan juga akan menjadi tolak kita, pertumbuhan ekonomi ke depan, perkembangannya seperti apa? Itu perlu kami ketahui.

Jadi garis besarnya, tolong alasan-alasan yang sudah menjadi sesuatu yang dahsyat ini tidak perlu muncul lagi Pak. Bapak harus punya inovasi, punya kreativitas sehingga daerah-daerah lain yang selama ini masih menghadapi masalah-masalah yang sama itu bisa diselesaikan. Dan ke depannya rencananya akan seperti apa. Itu saja Bapak Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Najib. Silakan Pak Misbakhun. Selamat datang Pak Bambang.

F-P. GOLKAR (M. MISBAKHUN, S.E., M.H):

Terima kasih Pak Ketua yang saya hormati.

**Ketua BAKN, Wakil Ketua BAKN yang saya hormati,
Anggota BAKN yang saya hormati,
Tamud undangan kita hari ini yaitu Hiswana Migas yang saya hormati.**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya.

Pokok pembahasan kita saat ini sebenarnya salah satu yang sangat fundamental Pak di dalam cara kita mewujudkan salah satu cita-cita negara yaitu *well* (suara tidak jelas). Di antara upaya-upaya mewujudkan *well* (suara tidak jelas) di dalam nya adalah (suara tidak jelas) bagaimana rakyat itu menjadi sejahtera. Salah satu cara kita menyejahterakan rakyat itu adalah bagaimana kemudian apa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat itu bisa terpenuhi dan bisa disediakan oleh negara semua kebutuhan-kebutuhan dasarnya.

Dengan makin berkembangnya ekonomi, makin modernnya kita mengelola perekonomian, apa yang harus disediakan oleh negara itu kan mempunyai harga dan membutuhkan pengorbanan. Karena contoh, minyak juga tidak bisa langsung kita gali, tapi kemudian melalui proses eksplorasi, eksploitasi dan sebagainya. Kemudian juga dengan sumber mineral yang lain, termasuk di dalamnya ada emas,

kemudian ada besi dan sebagainya. Biasanya yang mengikuti perkembangan gas dan sebagainya.

Nah minyak yang selama ini kebutuhan kita menjadi motor penggerak hasil industri dan sebagainya, kemudian di dalamnya juga ada gas, ternyata ketika dikelola dan dieksplorasi, dieksploitasi ternyata harganya menjadi mahal. Sementara tidak seimbang dengan apa yang menjadi kemampuan daya beli. Sehingga negara menciptakan mekanisme subsidi.

Nah subsidi ini kan macam-macam Pak. Melekat kepada barang, subsidi yang bersifat terbuka, subsidi yang bersifat tertutup dan sebagainya. Dan saya yakin ini adalah bukan ranah kebijakannya Hiswana tapi kita ingin tahu apa praktik-praktik subsidi ini di lapangannya ini berjalan sesuai dengan tujuan negara dalam upaya untuk menyejahterakan rakyat? Karena apa? Begitu subsidi ini dilakukan, maka ini adalah yang terjadi dalam praktik yang dalam mata rantai bisnis. Coba mata rantai bisnis. Sehingga orang pada tahu terjun yang paling enak bisnis itu adalah bisnis subsidi Pak karena pasti dibayar oleh negara. *Income* nya orang bicara aspek bisnisnya tinggal spek nya terbatas, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Orang akhirnya (suara tidak jelas) rebutan. Kalau rebutan subsidi itu biasanya rebutan area pemasaran. Gemuk atau tidak. Kemudian seberapa banyak biasanya.

Nah praktik yang seperti ini yang ingin saya tahu di Hiswana Migas ini. Karena apa? Begitu subsidi ini dilakukan maka negara juga *mikir nyari* untung. Karena apa? Dibikin lah BUMN yang mengurus subsidi, istilahnya PSO. Dulu subsidi Pak, sekarang makin canggihnya orang dengan alasan berbagai macam, dengan berbagai macam alasan yang tadinya subsidi tiba-tiba berubah menjadi namanya dana kompensasi Pak. Saya enggak tahu lagi nanti akan bergeser menjadi nama apa.

Cuma tempat ini kan adalah tempat bagaimana kita ini kan menjalankan mandat rakyat. Dipilih melalui Pemilu dan kemudian kita mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan yang salah satunya adalah melalui BAKN ini sebagai Alat Kelengkapan DPR menjalankan fungsi bagaimana apa yang menjadi temuannya BPK, temuan Badan Pemeriksa Keuangan itu kemudian bisa kita dalami lebih lanjut. Kemudian dari pendalaman itu, apa yang kita temukan? Apakah ada *policy* yang salah? *Policy* nya. Kemudian pelaksanaannya, atau dimana? Atau kombinasi antara itu. Nah di sinilah kita ingin kemudian melakukan koreksi.

Nah untuk menggali lebih dalam, karena Hiswana ini kan sifatnya BBM dan LPG Pak ya dan dua (suara tidak jelas) ini yang paling besar Pak (suara tidak jelas). BBM itu di luar nanti ada subsidi pupuk, ada subsidi listrik dan sebagainya. Transportasi juga ada. Tapi BBM ini yang selama ini paling besar, paling besar dan dalam sejarahnya republik ini Pak, iya BBM ini yang selalu menjadi. Dan banyak pertarungan peradaban, peperangan dan sebagainya itu disebabkan oleh yang namanya minyak, begitu. Kalau sebagai orang, kalau kita mengenal adanya emas, ini adalah emas hitam Pak, *the liquid* (suara tidak jelas) katakanlah.

Saya ingin menyampaikannya begini Pak, Pertamina sebagai operatornya negara yang memegang konsesi atas nama negara ini kan dia kemudian menjalankan PSO-PSO ini Pak (Public Service Obligation) PSO ini Pak, mulai dari distribusi dan distribusi itu kan kemudian di sub-kan kepada orang. Tetapi pemegang monopoli subsidiya itu negara, operatornya adalah Pertamina dan dibayar oleh uangnya Bapak-bapak semua, termasuk uang kita. Kita ini dibayar oleh negara, diambil pajaknya oleh negara, *dibalikin* lagi untuk urusannya yang seperti itu.

Nah saya ingin menanyakan soal selama ini menurut Bapak cara Pertamina mengelola sebagai operator yang menjalankan mandat negara dalam menyubsidi

BBM dan LPG menurut Bapak seperti apa dalam praktiknya? Karena Hiswana ini kan iya saya sebenarnya sebagai asosiasi yang sebenarnya, kan yang selama ini pasti punya suka duka berbisnis dengan Pertamina, tentunya Bapak dapat nikmatnya, tetapi kan kalau bisnis sama Pertamina itu kan untung enggak bisa tinggi, iya kan? Kalau rugi perlu digeser sama Pertamina di tempat Bapak-bapak. Nah kita *kepingin* tahu itu Pak, *kepingin* tahu seperti itu.

Kemudian yang berikutnya, cara Pertamina memperlakukan anggota Hiswana ini seperti apa? Apakah cukup adil bagi Bapak-bapak? Cukup adil? Karena bagaimanapun juga Bapak-bapak ini kan sebagai sub ordinatnya Pertamina harus menjalankan apa yang menjadi diinginnya Pertamina dan bisa terlaksanakan. Contoh, sebaran BBM tentu Bapak diantaranya kan adalah angkutan yang layak, terus bikin *storage* segala kalau menurut saya. Enggak Pak? Belum. Tapi kalau angkutan, terus apa lagi Pak kalau boleh tahu selain angkutan? Izin interaktif ya Pak Ketua.

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

(suara tidak menggunakan mic)

F-P. GOLKAR (M. MISBAKHUN, S.E., M.H):

Angkutan darat, laut udara Pak? Ke seluruh Indonesia Pak?

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

Kalau yang antar depo itu Pertamina sendiri.

F-P. GOLKAR (M. MISBAKHUN, S.E., M.H):

Antar depo Pertamina. Kalau Bapak dari depo ke retailnya?

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

(suara tidak menggunakan mic)

F-P. GOLKAR (M. MISBAKHUN, S.E., M.H):

Oke, iya begitu.

Nah yang *kepingin* tahu Pak dari proses bisnis ini, menjalankan kegiatan melayani Pertamina dalam menjalankan tugas *mandatory* utama mereka untuk ini, apa sih suka duka Bapak? Di situ saya *kepingin* tahu dengan pengalaman yang begitu banyak, apakah Bapak punya skema yang membuat BBM, membuat subsidi itu menjadi efisien? Kalau Pertamina enak Pak, berapa pun *cost* yang dia keluarkan pasti akan ditanggung oleh negara, pasti. Jadi bisnis yang paling gampang itu bisnis subsidi Pak. Bagaimana Pak? Karena negara tidak mau mengambil risiko pertama. Rakyat kekurangan dan ini rakyat yang kekurangan ini kan implikasinya politik. Makanya kekuasaan itu akan selalu berusaha mencari uang sebisa mungkin untuk bisa menutupi ini.

Nah kenapa Pak kemudian subsidi ini menjadi bagian yang paling material? Kalau biasanya orang mengaudit Pak itu ada *size materialis*. Seberapa material dan

ini adalah satu kunci utama Pemerintah dapat WTP atau tidak. Nah Bapak-bapak sebagai ujung tombaknya walaupun asosiasi tapi kan Bapak-bapak yang tahu. Tadi kan saya tanya suka dukanya, saya *kepingin* tahu Bapak punya skema yang paling efisien apa enggak.

Contoh selama ini kan tadi Pertamina paling enak Pak kalau bisnis itu dianggap paling gemuk, diambil sendiri. Kalau kemudian yang susah ke mana? Ya sudah dibagi saja sama operator. Kan selalu begitu. Bayarannya bagaimana? Iya sudah, *Iu* boleh untung tapi enggak boleh besar, begitu. Karena begitu mata rantai itu ada mata rantai bisnis di dalam situ bisa-bisa anggota Hiswana ini perusahaannya bekas perusahaan Pertamina juga bisa jadi, begitu. (suara tidak jelas) Pertamina lihat ini bisa jadi, bisa jadi Pak, saya enggak memastikan tapi saya anggap bisa jadi seperti itu.

Nah ini lah yang saya tahu, apakah efisien di sana itu ditemukan? Karena kalau tidak efisien Pak, subsidi ini juga akan menjadi beban lagi. Tugas utama kita itu adalah menyejahterakan rakyat yang menerima subsidi Pak, begitu. Termasuk ya Bapak-bapak ini termasuk bagian dari, bagian mata rantai bisnis subsidi yang dikelola oleh negara. Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaiumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya silakan, Pak Bambang Haryadi ini anggota BAKN dari Fraksi Partai Gerindra, Jawa Timur IV. Langsung diskusi saja.

F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang saya hormati Ketua BAKN dan Wakil Ketua BAKN,
Serta juga teman-teman anggota BAKN,
Yang saya hormati Ketua Hiswana Migas beserta jajarannya.**

Subsidi ini memang sesuatu yang dilema. Dari zaman dulu kita ini sesuatu yang punya efek politik besar namun juga beban politik terhadap anggaran juga besar. Beberapa hari terakhir ini di Komisi VII terjadi usulan penambahan terhadap Badan Anggaran kuota LPG 3 kg. Nah saya kebetulan dulu 4 tahun di Komisi VII, jadi saya paham Hiswana Migas ini. Jadi ini sebuah organisasi pengusaha Migas tapi punya hubungan sangat erat dengan Pertamina. Bahkan disinyalir banyak isinya eks-eks Pertamina. Hubungannya dari zaman Pak Ahmad Bambang Direktur Pemasaran sangat dekat karena juga mereka mengatur hilir.

Subsidi kami soroti dari dulu banyak sekali penyimpangannya. Kenapa saya bilang dilem? Contoh subsidi LPG 3 kg, bukan kita tidak sepatutnya itu diberikan kepada masyarakat, tapi sasarannya tidak tepat. Sama halnya subsidi 3 kg itu seperti kita menyubsidi tabung. Mungkin di antara kita Pak Ketua kalau *nenteng* tabung 3 kg ke Indomaret pasti dikasih. Saya analogikan seperti subsidi tabung.

Seorang Menteri ataupun Presiden asal Pak Presiden pakai topeng beli ke Indomaret pakai masker dikasih.

Nah inilah perannya Hiswana di sini. Termasuk juga kami selalu Sidak itu dulu ada pengoplosan, karena ada disparitas yang cukup tinggi antara LPG 3 kg dengan 12 kg. Jaraknya harganya jauh. Bahkan HEP yang dilakukan Pertamina kalau enggak salah itu 17 ribu atau 16 ribu ya Pak? Tapi di pasaran mendekati bulan puasa atau lebaran itu dijual di Dapil saya saja sampai 25 Ibu. Padahal HEP nya itu 16 ribu. 16.500 itu sudah ada unsur untuk pengusaha juga, kalau enggak salah 3000 per tabung. 2000 atau 3000 lah lupa saya. Iya ada unsur barang ini, segmennya ada masing-masing. Nah di sinilah sebenarnya Hiswana ini yang bertindak. Bagaimana mengawasi anggota-anggotanya. Banyak itu anggota Hiswana Migas semua itu pengusaha LPG dan mereka semua main di LPG subsidi, enggak ada yang mau main di lagi merah muda yang *pink* itu yang buatan Pertamina, enggak ada yang mau karena pangasanya lebih kuat yang subsidi.

Nah ini kita ingin Hiswana ini hadir tidak hanya menguntungkan anggotanya. Bahkan anggotanya menyimpan pun dibiarkan saja. Makanya saya kami enggak sepakat ada penambahan kuota LPG 3 kg itu. Karena bagaimana kita berikan rakyat di bawah banyak yang enggak dapat, itu baru soal LPG. Beban subsidi LPG tidak seberapa, yang paling besar solar. Kami di dulu di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan dan Timur yang banyak tambang. Itu pengusaha tambang mendirikan semua, POM bensin. Jadi setiap mau APBNP ada penambahan kuota subsidi, khususnya solar yang biasanya 47 juta kl untuk total kebutuhan BBM. Ada 15 juta itu untuk solar. Itu selalu menambah, selalu minta tambah. Yang aneh, kita data otomotif pengguna solar dan angkutan umum sangat kecil. Tapi penggunaan solar di Kalimantan Selatan itu besar banget, bahkan sering kurang.

Jadi kita minta supaya ke depan Hiswana Migas tidak hanya meminta setiap, kan mereka setiap pembahasan anggaran selama ini datang Ketua di Komisi VII dulu. Minta penambahan kuota, minta ditambah in keuntungan. Tapi mereka enggak bisa tertibkan anggotanya. Mereka ini pemain hilir semua. Bahkan ada beberapa, kaya contoh selain Pertamina kan AKR itu ada di Hiswana. Betul enggak? Karena pemain BBM subsidi itu selain Pertamina juga ada beberapa swasta, salah satunya AKR.

Kami sudah sering diskusi dengan BPH Migas waktu itu kan bahwa bagaimana kita mengajak Hiswana ini ikut menertibkan. Makanya, karena disparitas antara harga subsidi dan yang non subsidi itu jauh. Solar, contoh solar. Solar itu 6500, betul ya Pak? Oh iya *sorry*, 5100 ya sekarang. Sedangkan solar itu sampai 10.000. LPG 3 kg contoh, 16.000, kalau digabung 4 tabung jadi 12 kg itu kisaran Cuma 70-80.000. Sedangkan yang 12 kg itu 150.000. yang namanya kesempatan yang menguntungkan itu selalu ada pikiran jahat, pikiran rakus.

Maka itu, saya minta pada Hiswana Migas ikut aktif lah. Jangan hanya minta untung, kan? Makanya kita menyoroti BPK supaya bisa lebih intens mengaudit terkait penyaluran subsidi yang BBM ini pada masyarakat. Karena banyak sekali yang enggak mendapatkan. Solar, terutama solar. Solar itu sangat besar. Bahkan sekarang ini PLN itu menjadi temuan HSD yang zaman Pak, siapa itu? Itu sama, karena ada campuran barang subsidi di situ antara Patra Niaga dengan beberapa pemain.

Jadi dunia BBM subsidi ini sudah kita geluti lama Pak. Jadi di situ ada permainan tukar-tukar faktur saja. Dan itu semua pemainnya adalah pemain di bawah naungan Hiswana juga. Makanya kita mengajak Hiswana juga. Ini semua mereka, kita ajak. Waktu itu kita pernah sosialisasikan, ajak kita beralih ke LNG.

Tapi teman-teman Hiswana kurang *welcome*. Padahal ke depan kita butuh penggunaan LNG, bukan lagi LPG terus. Saya waktu itu temui teman-teman di Jawa Timur, ayo tolong sosialisasikan penggunaan LNG, dulu bersama PGN kan. Nah tapi ini pemain LNG selalu dihadang, ditutup pintunya oleh pemain LPG. Karena LPG di itu ada subsidi. Dan ini yang kami soroti bahwa subsidi itu penting untuk rakyat, tapi jangan sampai *diembat* oleh orang-orang yang punya kepentingan bisnis.

Jadi saya harap Hiswana Migas sebagai garda mitra terdekat dari Migas ini kan selain Hiswana enggak ada. Ini kalau di PLN mirip AKLI Ketua, mirip. AKLI itu isinya mantan orang PLN juga. Jadi yang minta teman-teman Hiswana bagaimana terkait BBM khususnya ya BBM solar itu kan, karena anggotanya pelanggan-pelanggan itu, kalau perlu laporkan sendiri Pak ke penegak hukum. Makanya kami teman-teman Komisi III lagi membuat kerja sama dengan BPH Migas karena teman-teman Pertamina ini juga unik. Dari dulu selalu mintanya BPH itu tidak diperkuat. Mereka mintanya supaya pengawasannya internal saja. Kepolisian, begitu kan. Padahal Badan Pengatur Hilir Migas itu BPH. Cuma BPH sendiri hanya dilengkapi oleh PNS yang ya masih bisa di inilah, dikadal-kadali lah begitu.

Jadi kita perlu kerja sama. Hiswana ini kan enggak menuntut bahwa teman-teman pengusaha, kecil sekali mereka memang. Untuk BBM khususnya bensin, sekarang mungkin enggak sampai 200 itu per liter. Margin yang diberikan, 250 ya?

(suara tidak menggunakan mic)

Iya untuk yang ini pertamax kan kecil kan? Iya.

(suara tidak menggunakan mic)

Oh jadi intinya mereka margin yang diberikan oleh Pertamina itu sangat kecil. Cuma memang di sini bukan barang-barang non subsidi. Jadi kita mengajak teman-teman Hiswana ayo. Bahkan di daerah saya itu di Jawa Timur itu hampir semua pengusaha BBM itu, pengusaha POM bensin itu jarang mau ada RON95 itu jarang mau. Padahal bagaimana kita mau mengajak mereka ini? RON92 saja mereka kadang pura-pura kosong. Mereka itu berlomba-lomba menjual yang subsidi. Memang itu lebih cepat, tapi ayolah kita sama-sama kita ajak bagaimana masyarakat itu lambat laun bisa mengurangi penggunaan subsidi itu walaupun tidak bisa serta merta. Karena semua itu sebenarnya tergantung Hiswana juga, ya?

Saya itu kalau ke Dapil itu nyari RON95 itu sulit banget. Eh *sorry*, RON 98. Maksudnya kan tetap saja. Contoh kan di daerah itu kan kita harus ajak semua orang *ngisi* 95-98. 92 itu kan *dexlite* kan. Pertamax ya 92?

(suara tidak menggunakan mic)

Jadi itu saya pikir itu Bapak Ketua. Jadi kita mohon Hiswana bisa menertibkan terutama yang di daerah itu loh Pak. Yang tukang oplos-oplos itu, banyak banget. Bukan oplos ini loh. Dulu kan oplos solar. Dulu kita pernah tangkap itu di daerah Jakarta Timur, Daerah Taman Mini situ, Pondok Gede. Dulu karena waktu itu solar enggak ada warna. Sekarang kan sudah berubah. Dulu mereka coba dari minyak tanah dikasih aspal, berubah jadi solar lucu juga itu.

Nah inilah saya harap Hiswana Migas bisa menertibkan mana yang pengusaha yang nakal sama yang enggak kan. Kalau perlu dicabut saja izinnya. Mungkin ini saja dari saya Ketua. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Bambang. Silakan Pak Ahmad Syaikhu.

F-PKS (AHMAD SYAIKHU):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

**Yang saya hormati Pimpinan dan para anggota BAKN DPR RI,
Yang saya hormati Pimpinan Hiswana Migas beserta jajaran.**

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Pertama mungkin saya ingin mengingatkan bahwa tujuan dari pertemuan ini, undangan ini adalah untuk mendapatkan masukan Pak dari Hiswana Migas khususnya. Ini dengan seakurat dan setepat mungkin sehingga kami juga berharap selain tadi daftar pertanyaan ini ada dokumen-dokumen yang bisa diserahkan ke BAKN, begitu ya.

Kemudian, kami juga ingin bahwa kenapa penelaahan kami di BAKN ini menysasar kepada subsidi Migas? Karena kita ingin justru ke depan pemberian subsidi ini akan se efektif dan setepat sasaran mungkin, tidak melenceng dari apa yang sudah diamanahkan. Karena kalau tidak diatur dan tidak diarahkan dengan baik, tentu akan terjadi terus kebocoran-kebocoran yang akan pada akhirnya memberatkan keuangan negara. 2009 saja dari target 14,5 juta kl, ternyata kita jebol sampai 16,2 kl. Nah ini akan terus seperti itu terjadi kalau tanpa dimulai dari sekarang ke depan ini kita harus lebih ketat dalam upaya untuk mengontrol subsidi energi ini. Nah kunci utama tadi, ya Hiswana Migas mau kiranya juga untuk berbagi pengalaman dan kemudian nanti ke depan juga mau mengimplementasikannya, seperti tadi apa yang diinginkan oleh Pak Bambang.

Nah oleh karena itu dasar kami bekerja ini adalah dari laporan BPK. Jadi temuan-temuan yang berapa tahun lalu ini kami paham betul terkait dengan apa yang terjadi terkait subsidiya, termasuk yang di Hiswana. Oleh karena itu jangan sungkan-sungkan terhadap kami untuk menyampaikan, karena ini justru bahan untuk perbaikan ke depan. Jadi kalau Bapak nanti agak segan menyampaikan data informasi dan sebagainya, tentu nanti kita juga enggak akan mampu memperbaiki ke depan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Nah maka data-data ini yang perlu kiranya kami juga dapatkan.

Dari proses mungkin pertama dari perencanaan. Perencanaan ini apakah nanti saya akan tanya kepada Bapak, apakah Hiswana Migas ini diberikan juga uang untuk merencanakan sendiri? Sehingga kalau tadi misalnya dari (suara tidak jelas) 2019, 14,5 kl itu apakah semuanya ini direncanakan oleh Hiswana misalnya. Atau ada elemen-elemen lain, atau memang enggak dilibatkan. Hiswana cuma *given* saja dari Pertamina. Ini loh yang subsidi Migas yang harus kamu terima. Nah atau tadi ada proses perencanaannya memang dilibatkan.

Yang kedua, dari sisi realisasi atau pelaksanaan. Berapa sesungguhnya dari subsidi yang tadi, misalnya direncanakan 14,5 itu jadi 16,2 kl, apakah semua itu memang kita ingin dapat data berapa sesungguhnya setiap tahun realisasi dari Hiswana Migas yang disalurkan oleh Hiswana Migas itu. Nah kalau tadi kita melihat berarti ada kebocoran-kebocoran yang terjadi dengan melakukan oplosan karena ada selisih harga lagi, dan cukup menarik selisih harganya, mungkin bisa jadi 2 kali lipat. Nah itu tentu Bapak juga sebagai Pimpinan Hiswana tentu bisa mendeteksi loh. Ini pelaku-pelakunya ini sebetulnya bisa jadi orang-orang tertentu saja. Dan itu justru yang merusak Hiswana Migas.

Nah kemudian di situ kalau sudah memang ketahuan, apa langkah-langkah Hiswana terhadap para pelaku yang melakukan oplosan, atau melakukan justru merusak citra Hiswana ini dalam kaitan subsidi yang diberikan? Nah mohon ini juga nanti diberikan. Apakah memang Bapak ada surat teguran atau ada bahkan dicabut izin operasional dan sebagainya, tolong juga itu disampaikan kalau memang itu ada.

Dan yang ketiga terkait tadi dengan pengawasan. Hiswana Migas ini bagaimana pun juga mengawasi 7000 SPBU dan 4000 PSO tentu ini bukan sebuah hal yang ringan. Nah kira-kira apa yang dilakukan oleh Hiswana Migas dulu kaitan ini *tools-tools* dalam melakukan pengawasan terhadap anggota-anggotanya? Nah kalau memang anggotanya dibiarkan begitu saja tanpa ada pengawasan, sudah bisa dipastikan pasti akan pola pikirnya cari untung. Nah dengan cari untung pasti akan mengonversi subsidi Migas ini dengan suatu yang lebih menarik, iya kan? Itu yang kita ingin mengawal. Nah justru ini kuncinya ada di Hiswana Migas.

Oleh karena itu saya dan teman-teman ingin mengetahui secara lebih mendalam apa sebenarnya yang dilakukan oleh Hiswana Migas selama ini? Saya kira itu Pak Ketua yang dapat saya sampaikan.

*Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq,
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Ahmad Syaikh.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Tadi sudah ada empat anggota, 3 anggota dan 1 Pimpinan sudah melakukan pendalaman. Virtual enggak ada yang *join* ya? Kosong ya virtual ya? Baik, kita masih cukup punya kelonggaran waktu, kurang lebih 30 menit lagi. Saya persilakan kepada Pak Ketua Hiswana Migas Pak Rachmad Muhammadiyah untuk *respons* apa yang tadi ditanyakan. Silakan.

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

Terima kasih Pak. Cukup banyak ini Pak. Mungkin tadi saya belum memperkenalkan Pak yang di sebelah kanan saya Pak Heddy, itu dari Ketua Departemen LPG PSO. Kemudian di kiri saya Pak Happy Herryawan Ketua Departemen SPBU. Jadi karena ini terkait dengan penyaluran subsidi, masuk di

bidang SPBU dan LPG 3 kg maka Ketua Departemen saya ajak untuk ikut mungkin bisa menjelaskan lebih *detail*.

Yang saya jawab mungkin dari Pak Najib ya Pak. Untuk kelangkaan menjelang lebaran, terus harga naik ya Pak ya. Jadi kita Hiswana Migas bersama-sama dengan Pertamina memang kalau ada hari besar atau kegiatan tertentu yang cukup melibatkan atau ada terjadinya kenaikan-kenaikan kebutuhan, itu kita biasanya mengadakan Satgas Pak. Jadi contohnya kayak mau lebaran itu biasanya ada Satgas Rafi (Ramadhan dan Idul Fitri).

Nah memang untuk tahun ini kebetulan kebutuhan pas lebaran itu malah cenderung turun karena enggak ada kegiatan apa-apa. Jadi relatif turun semua jadi enggak ada apa-apa. Tapi di tahun-tahun sebelumnya dan pada saat normal itu kita paling tidak ada dua kali Satgas. Itu Satgas pagi dan Satgas Nakal baru. Di Satgas itu ada beberapa hal yang kita bersama Pertamina untuk kerja sama dengan Pertamina Pak untuk melayani ke masyarakat. Salah satunya adalah pencukupan dari pada barang-barang yang akan kita salurkan. Jadi terutama BBM dan LPG 3 kg ini.

Tapi yang utama sekali adalah BBM karena kita setiap saat itu kita akan selalu melakukan kunjungan-kunjungan (suara tidak jelas) khususnya di Jawa. Karena kalau di luar Jawa lebaran itu hampir enggak beda jauh Pak, malah banyak yang libur kalau industrinya karena. Tapi kalau di Jawa itu ada yang industrinya tutup tapi kegiatan di rumah tinggi, karena transportasi juga naik sehingga khususnya jalur Jakarta-Surabaya itu kebutuhannya akan naik, khususnya di kalau menjelang lebaran itu dari Jawa Barat ke Jawa Timur sampai Jawa Tengah terutama puncaknya. Kalau balik itu dari Jawa Timur ke Jakarta. Biasanya sebelum-sebelumnya puncaknya itu yang fatal itu arus mudik karena arus mudik itu hampir berbarengan. Tapi kalau arus balik biasanya terpecah-pecah. Jadi tidak terlalu tinggi kebutuhannya pada saat tertentu. Hampir naik tapi rata-rata.

Kemudian untuk harga. Kalau BBM tentunya enggak ada perbedaan Pak ya karena itu di SPBU. Kemudian kalau di LPG sampai saat ini terus terang kita, karena tidak sedikit sekali Pak yang harganya naik Pak dan ini naik karena kalau lebaran itu banyak ada beberapa pangkalan yang tutup sehingga jualan ini, maaf-maaf di bawahnya pangkalan. Kontrol kita kadang-kadang itu di pengecer, toko-toko kecil atau apa itu kan tanda petik kalau orang Jawa *aji mumpung* lah. *Dinaikin* saja Pak, dia pun buka mungkin separuh-separuh hari kerja, jadinya agak dinaikkan.

Mungkin seperti itu Pak tapi kalau dari kami sih sangat jarang sekali terjadi atau keluhan adanya harga LPG yang naik menjelang lebaran atau mendekati hari lebaran. Jadi kalau pun ada, kita segera konversi yang Bapak minta untuk menambah penyaluran di daerah itu supaya tidak terjadi kekosongan. Sehingga kalau secara pasar kan, kalau barangnya banyak harga akan turun. Itu hitungan pasarnya akan seperti itu.

Kemudian tadi untuk kondisi Covid memang kalau kondisi Covid di SPBU pada saat awal bulan Maret awal pertengahan sampai akhir itu adanya beberapa kota yang PSBB itu sangat turun drastis Pak, bahkan ada yang sampai 70% turun omsetnya.

F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E):

Itu ada catatan kerugiannya enggak?

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

Jadi teman-teman SPBU sempat diskusi dengan kita. Katanya rugi dimana? Iya angka ruginya 99 lah. Toh kondisinya memang seperti ini. Sempat beberapa itu mau tutup atau mau, kita sampaikan ke teman-teman, tolong tetap dibuka. Meskipun tidak seluruh fasilitas, artinya kalau punya beberapa pompa, dispenser Pak ya. Itu paling tidak ada yang satu yang doble, boleh ditutup. Karena penjualan diturunkan pada saat itu sehingga kita minta semuanya tetap buka dan tidak sampai kita harap untuk tidak sampai di PHK karyawannya. Dan karena kita juga pertimbangkan PSBB kan enggak mungkin terus-terusan Pak.

Nah sekarang sudah mulai naik lagi. Kira-kira kalau dibandingkan normal itu kita turun saat ini 10-20% saja rata-rata. Karena anak-anak sekolah belum masuk dan orang-orang keluar, kalau tidak perlu tidak keluar. Seperti itu.

F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E):

Pimpinan, izin untuk.

Nah ini kan begini Pak, tadi kenapa saya juga tanyakan antisipasi terkait Covid yang sekarang kita sedang diskusikan. Kemarin kita dalam rapat yang lain dengan tempat lain dengan Kementerian ada yang menyatakan bahwa kita tidak akan pernah tahu kapan wabah akan berhentinya. Artinya kan di teman-teman Hiswana beserta mitranya ini kan perlu juga mengantisipasi. Mengantisipasi jangan sampai kemudian dalam kondisi itu pertama, tidak boleh tetap tidak boleh terjadi kelangkaan, tapi di sisi lain juga tetap menekan kerugian kan begitu kira-kira.

Nah ini yang kami ingin dengar Pak langkah-langkah yang komprehensif dalam rangka menanggulangi hal tadi. Kira-kira seperti apa? Coba.

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

Baik Pak.

Jadi kami terus terang pada saat lalu sudah diskusi dengan Pertamina. Pertamina kalau minta agar pelayanan di seluruh daerah tetap terlayani. Kami dari Hiswana Migas sempat mengutarakan bila mana kondisi ini sudah parah, artinya kadang kalau tadi sampaikan turun sampai ada yang 50-70% lah Pak turun habis segitu dan berlangsung cukup lama. Saya sekedar punya rencana untuk jadi kita koordinasi di suatu daerah, mungkin SPBU ini sama kaya di penanganan di pasar itu Pak, tanggal genap mungkin SPBU nya yang jalan, tanggal ganjil (suara tidak jelas). jadi giliran supaya kita bisa *neken* biaya operasional dari pada SPBU. Salah satunya seperti itu Pak. Tapi tetap kita berusaha jangan sampai satu daerah akan terjadi kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok BBM. Mungkin itu.

Kemudian tadi dari Pak Misbakhun, mungkin secara keseluruhan Pak ya. Jadi kalau tadi disampaikan ada selisih BBM, harga BBM kemudian penyaluran LPG. Terus terang pada kami tadi seperti kami sampaikan, permasalahan utamanya adalah perbedaan harga. Jadi kita terus terang berusaha untuk melakukan pengawasan maupun mencegah anggota, tapi kadang-kadang maaf-maaf di beberapa daerah itu ada oknum-oknum yang *membacking* i atau malah memaksa SPBU untuk melakukan hal tersebut.

Jadi enggak berani Pak. Kalau enggak malah dipermasalahkan kondisinya. Jadi ada beberapa SPBU itu yang malah selama itu wajib untuk dia beli-beli 1 drum, ada seperti itu salah satunya. Jadi kalau enggak malah nanti dicari masalah-

masalah yang lain. Kalau itu tapi di daerah Pak, bukan di kota. Kalau di kota hampir tidak ada.

Terus kemudian karena perbedaan harga yang tinggi ini, ini yang menyebabkan timbulnya suatu kegiatan yang ilegal untuk menjual ke yang membutuhkan dengan (suara tidak jelas). Seperti itu. Nah kami terus terang dari Hiswana Migas kalau untuk efektivitasnya mungkin ada dua hal Pak utama. Satu, penerimanya ini diperketat, diperjelas, atau diper*detail*. Iya terus terang kami pun tadi Bapak sampaikan kalau Pak Jokowi pakai topeng mungkin beli ya kita juga enggak bisa *nolak*. Demikian juga LPG 3 kg. LPG 3 kg kalau Bapak beli, masa mau nanya, Pak bapak kaya atau miskin? Malah nanya begitu ya enggak mungkin.

Ini kita minta kalau bisa adanya lebih tepat. Yang kedua, selisih harga antara yang subsidi dan non subsidi itu diperpendek, diperkecil. Sehingga pada saat katakan orang itu terpaksa LPG nya yang subsidi itu kurang atau BBM nya solar itu kurang, orang *switching* ke non subsidi itu mudah.

F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E):

Sebentar, boleh izin sebentar.

Pertama saya bilang, kenapa kalau Hiswana mengetahui itu, kenapa tidak ada keinginan menyampaikan? Waktu itu saya di Komisi VII tidak ada penyampaian kesulitan. Bahkan yang tadi Bapak bilang mungkin di bawah pangkalan, eceran, kami sudah tahu, kebetulan Dapil saya sendiri. Karena satu orang pangkalan saya bilang, dia dari agennya itu tidak dikasih. Bahkan belinya pun dia sudah berbeda. Harus bayar duluan. Bahkan sempat saya ancam itu saya mau tutup itu.

Nah jadi maksud saya, ada enggak keberanian Hiswana? Kalau kita sama-sama tujuannya untuk masyarakat, berani enggak Hiswana memberikan promo atau aduan bilang bahwa harga LPG 3 kg harganya 16.500. Saya dulu pernah *ngomong*, berani enggak? Seperti kaya toko obat, ditulis HET, nah ini HET 1000, procol misalnya kan. Hiswana berani enggak? Apakah memang sengaja dibuat di ranah abu-abu itu?

Jadi kaya tadi dibilang juga disparitas antara subsidi dan non subsidi diperpendek. Itu suatu keinginan yang sulit karena ada efek elektoral yang harus dipertaruhkan oleh Pemerintah. Tidak mudah kita mencabut subsidi itu, apalagi untuk masyarakat. Dan kami pun sepakat subsidi untuk saat ini di tengah kondisi masyarakat, apalagi kaya sekarang, wajib diberikan. Bahkan sekarang subsidi sektor ekonomi penting berikan. Apalagi hanya subsidi untuk LPG.

Cuma yang kami sedihkan dan sayangkan, di sini tidak ada sinergitas antara Pertamina dan Hiswana sendiri. Ya kita kesan memang dua-duanya ingin bermain di ranah abu-abu ini. Bahkan kemarin itu ada yang namanya bensin cetengan itu yang kecil-kecil? Pertamina, yang kecil-kecil itu. Itu diatur bareng Hiswana. Yang itulah, yang produksinya Pertamina yang cetengan yang pakai mesin itu, itu kan iya. Jadi itu ada garuda apa itu. Nah Garuda Mas, yang mengatur ini siapa-siapa yang bisa dapat. Kan itu rencana kan ada alat ukurnya kan. Karena itu kan belum akuratnya kan akurasiya belum. Rencana mau dibuat ini kan.

Nah maksud saya, itu apalagi itu menyalurkan subsidi juga. Itu ada premiumnya loh itu. Jadi yang saya maksud Hiswana, saya dari dulu ini kritik Hiswana. Walaupun saya ada saudara saya yang menjadi pengurus Hiswana. Saya bilang bahwa Hiswana ini apa ya, maaf ya, pura-pura ini saja lah. Pura-pura bantu masyarakat tapi mereka bermain di ranah abu-abu itu. Kalau berani tulis dong,

umumkan kepada masyarakat bahwa harga eceran tidak boleh lebih dari 1000. Selalu alasannya kuota. Kuota kita paham Pak.

Mereka teriak-teriak penambahan kuota yang biasanya 1 agen bisa 2 DO, mereka alasan ini, minta tambahan itu. Karena yang namanya LPG 3 kg itu, itu pasarnya jelas. itu sangat jelas Ketua. Itu 1 DO per hari. Kalau habis 1 DO, 1.500.000 di tangan, begitu. Saya paham betul kenapa mereka bermain, bagaimana mereka memaksimalkan. Jadi kalau 1 agen bisa mengeluarkan normal saja, mereka sudah diberikan keuntungan 30 jutaan per bulan kalau dengan 1 DO.

Jadi maksud saya bahwa Hiswana ini tolong juga bantu kami lah menertibkan anggota-anggota yang nakal ini. Belum lagi mereka *ngoplos*. Belum lagi yang memainkan harga ini, alasan kosong. Apalagi sudah menjelang lebaran, bulan puasa, selalu dibidang kosong LPG 3 kg. Selalu ada ini. Makanya saya sampai semprot ini SPBU-SPBU itu. Jadi permainan kuota inilah yang dimainkan oleh pemegang-pemegang agennya, bahkan sampai berlebih. Bahkan juga ada tumpang tindih juga.

Contoh di satu kabupaten, kuotanya berapa, izinnya 4, tidak berimbang. Pandeglang contohnya, kurang. Memang (suara tidak jelas). Sekarang (suara tidak jelas) sudah berhenti ini kan, sudah pindah. Bambang dulu Direktur Ahmad Bambang saya suka ribut sama dia. Iya, karena memang itu permainan dua ini. Antara Hiswana dan pemasaran di Pertamina itu sepaket. Sepakat untuk sepaket.

Jadi saya pikir itu. Tolonglah Hiswana itu penertiban terhadap anggotanya itu jelas berikan. Khususnya LPG 3 kg. LPG 3 kg itu luar biasa permainannya. Bahkan penerbitan izinnya asal-asalan juga. Iya kalau itu kan saling makan saja. Kalau yang sudah dapat 3 DO dikurangi 1, diterbitkan 1 lagi izin. Kita paham lah itu. Namun maksud saya jangan sampai keagenannya banyak, tapi masih main-main. Mereka sudah diberikan keuntungan loh.

Jadi saya boleh tanya Ketua Hiswana. Satu agen kalau dia sehari bisa itu 560 tabung 1 DO, betul ya Pak? Itu kalau satu ini itu, itu 1.500.000 per hari. Itu masih mau *ngakal-ngakali* rakyat. Kan kasihan. 30 juta setiap bulan. Oh enggak, kalau jual normal enggak. Enggak ada. Yang enggak normal inilah yang mungkin main dengan aparat. Tapi kan itu normal. Kalau normal saja segitu. Makanya saya bilang tolong Hiswana juga itu diberikanlah, kalau perlu sosialisasi. Kita bantu dengan BPH. kebetulan Kepala BPH itu mantan anggota DPR juga, satu partai sama beliau, Pak Fasrullah. Kebetulan saya dulu yang ikut memilih dia.

Jadi itu Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, lanjut dulu Pak Rachmad masih ada? Iya lanjut dulu.

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

Terima kasih Pak.

Jadi mungkin saya sedikit menjawab Pak. Kalau untuk penyampaian Harga Eceran Tertinggi terus terang kita memberikan kewajiban kepada pangkalan itu untuk memasang plang dimana kita Hiswana Migas juga, karena HET ini tiap-tiap daerah berbeda Pak dengan. Jadi di daerah itu HET nya berapa itu harus dicantumkan di pangkalan. Itu sebagai upaya kita untuk pengawasan harganya Pak. Jadi setiap pangkalan itu pasti ada plang, pangkalan apa namanya, dari agen mana,

agen yang jadi anggota kami, kemudian harga HET di sana itu berapa? Itu harus ada, wajib ada itu Pak.

Nah kalau tadi kalau ada, jadi alokasi dari pada agen itu tadi. Kita diberikan alokasi sebulan, atau tiap hari itu berapa LO, bukan 1 LO, itu 1 LO. Nah dari agen ke pangkalan itu ada surat kontraknya. Dia sebulan dapat berapa. Nah kalau melanggar dari itu, itu bisa ditertibkan karena itu sudah kesepakatan bisnis antara agen dengan pangkalan. Tapi kalau (suara tidak jelas) nya tetap, kita pun untuk menambah alokasi itu sangat sulit karena Pertamina juga alokasinya dibatasi atau ditentukan oleh Pemerintah, kuotanya. Jadi kalau memang satu ya satu kalau di pasar lagi naik kebutuhannya.

Nah ini kita sampaikan ke Pertamina kalau kondisi yang seperti ini, kalau tidak *ditegasi* akan terjadi kelangkaan. Nah kita mungkin kasih istilahnya kaya (suara tidak jelas) Pertamina Pak. Oke, *tak tambahin* satu, 50% satu hari itu selama sehari atau 2 hari Pak, terutama mendekati hari-hari besar, seperti itu. Itu dengan kita akan koordinasi Pak. iya Pak memang benar butuh, dan itu merata. Hampir rata ke seluruh agen.

Kemudian tadi, saya mungkin sedikit menganggapi untuk penyaluran di kios-kios Pak kaya (suara tidak jelas) Garuda Mas itu. Jadi Garuda Mas itu yang dijual adalah barang yang non subsidi. Jadi yang ada premiumnya. Kalau yang premium ada itu Pertamina, terus terang itu di luar kami. Di luar, enggak ada hubungannya dengan kami. Itu enggak jelas induknya bagaimana, saya juga enggak tahu persis. Tapi dia memang kadang-kadang belinya di SPBU.

Tapi terakhir-terakhir kita kerja sama dengan kepolisian, kita minta Pak untuk eceran di kios-kios ini kita tidak mau jual premium. Sehingga minimal produknya adalah pertalite. Seperti itu Pak. Jadi hampir semuanya pertalite. Cuma harganya kita enggak bisa mengatur karena itu bukan di bawah kita. Jadi bisa saja mereka agak tinggi untuk yang Pertamina-pertamina. Nah waktu itu Pertamina bikin, sekarang ada programnya Pertashop itu Pak. dengan produk pertamax. Mungkin itu.

Terus tadi ada dari Pak Misbakhun tadi,

F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E):

(suara tidak menggunakan mic)

Ke depan ini kan kita eranya bukan era lagi LPG, kita kan harus melangkah lebih maju. Ke depan ini kita pasti LNG dan kita punya stok LNG yang sangat luar biasa. Maksud saya ada enggak Hiswana ikut di situ, memasarkan LNG itu? Karena sampai saat ini pengguna LNG masih kecil Pak. Contoh di Jakarta ini, baru Cheetos yang menggunakan LNG, padahal harganya sangat murah, hanya berbeda tabungnya saja kan LNG dengan LPG kan? Ketebalan tabung kan? Tapi efisiennya jauh lebih efisien LNG dan harganya lebih murah. Contoh kaya di Surabaya itu Pak Ketua. Di Surabaya itu kan yang ke rumah-rumah itu Jargas, itu kan LNG semua.

Saya ini sebenarnya bingung juga. Padahal kan kalau Jargas itu jaringannya kita berikan ke pengusaha, karena Jargas itu memang BEP nya sangat lama. Namun kita ingin mengajak swasta di situ, Hiswana. Tapi ini kok kayanya Hiswana enggak begitu mau bergerak ke perubahan ini, begitu. Makasih mau jualan LPG. Karena LNG ini murah banget. Saya punya saudara di Surabaya itu, per bulan cuma 50 ribu dan dia tidak ada istilah pengamanannya habis gas.

Jadi maksud saya, kalau memang tadi semangatnya sama, toh juga *pengin* untung juga kan? Tol fee saja mengurus Jargas itu. Bantulah kami, bantulah

masyarakat, kita akan dorong dengan Pertamina juga untuk pemaksimalan LNG itu, Jargas-Jargas itu. Mungkin itu Ketua.

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

Saya menambahi lagi Pak. Jadi mungkin terima kasih Pak Bambang masukannya. Tadi menyambung utamanya dengan Pak Syaikhul Tadi adanya perencanaan Pak ya khususnya? Terus terang kalau perencanaan kita tidak ikut Pak. Jadi kita enggak ikut di perencanaan untuk alokasi penyaluran BBM subsidi maupun LPG PSO, nah itu Pertamina dan BPH dan Komisi VII yang menentukan. Kita hanya pada saat realisasinya kita koordinasi dengan Pertamina, kita dipanggil bagaimana caranya antisipasi penyalurannya bahwa penyaluran ini adalah sekian. Sama contohnya adalah solar, dimana tahun 2019 kemarin sempat jebol. Kita pun sampaikan ke Pertamina. Pak, yang tahun 2019 kita memang agak sulit karena kuota tahun 2019 turun dibandingkan tahun 2017 dan 2018.

Kita sempat juga ikut rapat dengan BPH. BPH menurunkan itu salah satunya alasan adalah Pertamina pada saat itu punya rencana untuk melakukan digitalisasi yang mana untuk menyaring konsumen-konsumennya mana-mana yang berhak, sehingga diharapkan bisa turun dari pada tahun sebelumnya. Yang kedua, alasannya adalah alokasi yang diberikan tahun-tahun sebelumnya itu selalu lebih dibandingkan realisasi, ada lebih sedikit-lebih sedikit, begitu Pak. Sehingga tahun 2019 turun. Tapi di kita, di anggota kita memang grafiknya itu naik Pak.

Nah ini memang perlu ada upaya-upaya untuk menjadikan solar ini benar-benar efektif. Jadi kalau efisien kan nanti kita enggak tahu anggarannya dari Pemerintah seperti apa Pak ya. Tapi untuk efektifnya itu salah satunya adalah kita harus diberi arahan yang lebih *detail*. Sebenarnya konsumen mana saja yang berhak. Terus terang kan, ini yang tadi. Kalau orang datang ke SPBU kami mengisi solar itu boleh atau enggak? Saat ini memang selain truk-truk, mobil tertentu itu memang enggak boleh. Truk besar itu enggak boleh. Tapi tetap kami (suara tidak jelas). karena kan (suara tidak jelas) *clear*. Lebih mudah.

Nah di satu sisi Pertamina memang saat ini menjalankan program digitalisasi yang mana dalam digitalisasi tadi akan bisa tercatat pelanggan-pelanggan itu L nya berapa, atau B nya berapa, Nopolnya itu Pak. Sehingga nanti kita juga menanyakan, sebetulnya kalau untuk kendaraan yang akan diberikan subsidi itu kendaraannya atau orangnya? Yang perlu kita diskusi lebih dalam lagi. Kalau memang itu untuk kendaraan umum, terus terang saya pun melihat itu masih perlu subsidi solar, terutama untuk angkutan umum dan juga angkutan barang untuk industri lah supaya harga-harga barang untuk perekonomian juga tetap secara efek *multiplayer* nya akan bisa bersaing harganya.

Nah saat ini kita terus terang di pelaksanaan ini agak sulit karena ini enggak boleh ini. Truk pun terpecah-pecah. Ada yang ini enggak boleh, itu boleh. Kita kan hidup di lapangan Pak. Sering kali kita juga berhadapan dengan konsumen-konsumen yang *ngeyel*, melawan. Enggak bisa Pak, ini begini-begini. Kita di ujung ini agak sulit. Sementara kalau jebol, kita yang dimarahi. Ini bagaimana? Karena (suara tidak jelas) terus terang kita harus akui seluruhnya di Hiswana Migas, anggota kami.

Kemudian satu tadi, kalau kita *ngomong* efisien, ya tentu harga. Jadi harga ini kalau saya melihat per Mei kemarin kalau tidak sala, itu AKR tidak mau jualan solar lagi. Karena harga solar industri Pak kalau normal pasaran itu lebih tinggi *dibandingin* harga jualnya yang di tempat Pemerintah, 5150 *plus* subsidi yang

dikeluarkan oleh Pemerintah. Itu masih di atasnya. Jadi kalau begitu dijual berarti rugi. Nah ini yang repot yang akhirnya seperti AKR dia enggak mau rugi ya enggak jualan. Sempat kita rapat dengan BPH pada saat 2019, kita dimintai langkah-langkah apa untuk bisa *ngerem* supaya enggak sampai melebihi alokasi yang diberikan, kuota yang diberikan. Mulai pertengahan tahun Pak kita tetap (suara tidak jelas) dengan BPH, AKR menyampaikan kita enggak jualan Pak. Kita pun, loh kok enak begitu, enggak jualan (suara tidak jelas) rugi, begitu loh. Nah pada saat awal tahun memang harganya turun, iya memang mungkin si operator enggak terlalu tinggi atau mungkin untuk, tapi kita enggak sampai masuk di sana.

Demikian juga untuk LPG 3 kg. Sampai saat ini kalau kita melihat memang ada beberapa pola untuk melakukan pengurangan subsidi agar supaya lebih efektif Pak ya. Itu salah satunya adalah di distribusi tertutup ataupun terbuka barangnya atau orangnya yang diberi subsidi. Terus terang saat ini kami di Celepu pelaksanaanya di lapangan itu kami lebih cenderung untuk tetap seperti saat ini, hanya lebih diperketat Pak yang beli itu siapa saja.

Yang kedua, kita kalau boleh usulkan, harganya sedikit dinaikkan. Tapi mungkin tidak saat-saat seperti ini karena kondisi seperti sekarang ini sedang ada kendala, ada pandemi. Banyak sekali masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Kenapa Pak?

F-P. GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E):

Harga minyak lagi turun sekali kan?

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

Kalau itu kan saya enggak ikut-ikut Pak. Itu kebijakan Pertamina. Kita sih sempat diskusi bagaimana ini harga gini-gini. Iya kita saja dekatnya masalah politis juga Pak. Kalau turun mudah, kalau naik susah. Kita hanya pelaksana saja kalau dengan terus terang Pak, kita enggak. Kita sih sempat menyampaikan, (suara tidak jelas) apakah turun atau apa? Begitu. Tapi keputusan di harga itu Pertamina dan ESDM yang memutuskan Pak. Kita hanya melaksanakan saja.

Terus untuk tadi untuk LPG dan (suara tidak jelas) untuk pengawasan tadi. Kita untuk SPBU tentunya pengawasannya tadi, kita akan lihat dari per daerah. Alokasi-alokasi ini akan dapat data dari BPH daerah-daerah seperti apa. Kita melihat (suara tidak jelas)? Kalau melebihi, kita harus *ngapain*? Mungkin dari sana ada, kadang-kadang tadi ada daerah tambang itu Pak yang bikin kadang-kadang penyaluran subsidi solarnya itu agak tidak tepat sasaran. Seperti itu.

Mungkin dari Pak Heddy mau nambahin atau Pak Happy? Silakan.

KETUA DEPARTEMEN LPG PSO (HEDDY S. HEDIAN):

Terima kasih banyak.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat. Saya hanya menambahkan saja Pak mungkin.

Jadi memang untuk LPG 3 kg tadi mengenai kelangkaannya dari hari besar keagamaan memang kita agak sedikit kedengarannya biasanya di puncak-puncak H-1 atau H-2 di hari besar keagamaan itu permintaan cukup melonjak. Kemudian

biasanya kita terkendala dengan jalur distribusi lalu lintasnya yang agak *crowded*. Nah ini biasanya memang bukan kelangkaan, tapi terjadi karena keterlambatan pasokan. Mestinya distribusi itu di pagi hari sudah ada di *outlet* di pangkalan, tapi ternyata karena terkendala lalu lintas biasanya agak terlambat. Sehingga memang masyarakat agak sedikit kesulitan mencari LPG.

Baik mudah-mudahan selalu kita perbaiki ke depannya. Ini akan terus ditingkatkan untuk pelayanan. Malah kita juga sekarang sedang mengembangkan dengan Pertamina *one village one outlet*. Jadi diusahakan di setiap kelurahan itu ada titik pangkalan yang memang bisa melayani. Walaupun memang di daerah-daerah yang agak cukup terpencil jauh, banyak daerah-daerah yang agak sulit dijangkau. Kemudian mengenai kuota juga seperti Hiswana Migas ini tidak pernah meminta Pak. Jadi kami ini *given* saja, terima. Kemudian apa yang kami maksud dari distribusikan oleh Pertamina melalui agen, itulah yang kita terima Pak, kita salurkan.

Keterkaitan dengan disparitas harga. Sebetulnya ini juga menjadi *problem* Pak buat kami, khususnya yang memang menjalankan LPG yang non subsidi. Jadi kami tidak lantas benar juga dengan disparitas yang cukup tinggi ini LPG non PSO kami juga enggak sedikit terhambat pemasarannya karena memang masih ada LPG yang jauh lebih murah. Dan ini sangat terbuka, siapa pun yang mau beli. Nah ini memang kalau seumpamanya LPG menjadi beban lebih berat untuk anggaran. Sudah cukup lama dari tahun 2007 awal konversi sampai sekarang 2020 mungkin sudah 13 tahun LPG 3 kg tidak pernah menjadi perubahan harga mendasar. Kalau seumpamanya memang memungkinkan agar lebih meringankan beban subsidi, secara bertahap mungkin pelan-pelan bisa disesuaikan harganya agar tidak memberatkan Pemerintah, sekaligus juga mungkin tidak memberatkan konsumen Pak.

F-PKS (AHMAD SYAIKHU):

Ini terkait tadi dengan selisih harga karena yang non subsidi lebih mahal ya? Tapi dalam kaitan tadi, kebijakan satu harga BBM itu, itu berarti ada bagaimana polanya ini? Untuk yang ini kan kebijakan BBM satu harga seperti di Papua atau segala macam seperti apa?

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

Oke Pak. Jadi kalau BBM satu harga itu kan ini Pak memang ada sedikit beda Pak ya. Jadi Pemerintah memutuskan untuk memberikan harga, karena di ujung tadi kan. Salah satu kendala kita itu adalah menyampaikan di tempat yang terpencil Pak. Jadi anggota kami atau jaringan dari penyalur yang resmi itu sudah putus sampai di kecamatan tertentu itu Pak ya. Nah untuk menjangkau kecamatan atau kelurahan yang lebih kecil lagi, itu kadang-kadang sama kaya, kalau di Jawa ini ada Pertamina, begitu loh Pak yang memang harganya terlalu tinggi.

Nah Pemerintah ingin memberikan harga yang sama kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk mendapatkan BBM berharga sama. Nah mungkin itu diberikan SPBU 3T. Itu untuk SPBU Pak, untuk BBM.

F-PKS (AHMAD SYAIKHU):

(suara tidak jelas) dari sisi *cost* itu kan lebih besar itu?

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

Memang, tapi iya itu kan kata orang-orang saja Pak. Dengan kondisi seperti ini, mau atau tidak. Kalau mau ya silakan. Kalau memang untuk penyalurannya tidak ada alokasinya, dan kuota itu hanya diberi sekian selama sebulan.

F-PKS (AHMAD SYAIKHU):

Itu khusus yang 3T itu?

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

3T iya. 3T juga, nelayan juga ada batasnya Pak, ada kuotanya.

KETUA DEPARTEMEN SPBU (HAPPY HERRYAWAN):

Terima kasih Pak. Saya cuma menambahkan saja tadi yang dipertanyakan terkait *marginnya* kecil untuk yang subsidi. Jawabannya memang iya. Tapi kami ini sekarang bagaimana caranya terkait menaikkan penjualan untuk yang non subsidi Pak. Jadi kalau dari tadi dibilang yang subsidi ini ya bagi kami ya *alhamdulillah* lumayan lah Pak, istilahnya ya walaupun enggak inilah sekitar 400-500.

Tapi yang saya mau bertanya malah saya bertanya balik, pada saat kami pada saat itu sudah membesarkan subsidi, pertalite penjualan katanya (suara tidak jelas) pertamax. Itu ada istilah *reborn premium* Pak. Nah ini kan ini bagaimana? Terus tadi juga dibilang, ini terjadi kelangkaan di wilayah itu juga kita berusaha dengan Pertamina itu untuk mengurangi mana yang berhak. Apalagi sekarang di eranya digitalisasi ini kan Pertamina tadi sudah disampaikan sama Pak Rachman, itu terkait adanya pencatatan survei solar Pak. Itu data sudah *terdetect* sebenarnya. Jadi kaya nomor polnya, berapa pengisian yang ada, itu semuanya juga sudah ada Pak.

Nah ini yang terakhir Pak kalau bisa saya mau bertanya terkait masalah iya kami ini kan walaupun kecil ya Pak, kalau dikumpulkan ini *alhamdulillah* lumayan Pak. Bahkan kalau dilihat dari sisi pembayaran dari sisi pajak, dari PBB KB itu untuk daerah iya lumayan untuk jumlah kami. Bahkan kalau bisa ini apa yang kondisi terkait masalah Covid ini kan apa yang kami juga banyak, ada pajak jalan keluar masuk, apa yang secara dobel-dobel begitu loh Pak.

Terus dari sisi perizinan pun itu yang kami lihat juga halnya itu kadang-kadang berbenturan Pak. Contohnya kaya masalah izin genset atau apa dari Dinas Tenaga Kerja itu narik ke kami juga, termasuk dari Dinas Ketenagalistrikan. Terus kalau saat ini juga kami yang jumlahnya sekitar 5000 sampai 6000 sekian ini kan tetap untuk BBM solar ini kan atau premium pun untuk penugasan mau enggak mau kan kita tetap harus ada Pak, iya kan? Kalau permasalahan tadi, kenapa kok terjadi hal-hal seperti yang, ada yang belok atau apa. Iya memang ada terkait disparitas harga yang cukup tinggi. Kalau tadi diusulkan kalau bisa kan harganya jangan sampai terlalu jauh, seperti itu.

Nah ini mungkin kami buat pengusaha kecil yang pribumi ini saat ini kan justru ada pesaing Pak. Mungkin langkah apa yang bisa dilakukan dari Bapak sebagai ini, aturan-aturannya itu kalau bisa dibikin sama dengan kami Pak. Jangan cuma adanya di Jawa yang besar, seperti itu Pak. Terima kasih.

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

Mungkin sedikit nambah Pak ya, lebih memperjelas tadi yang perihal untuk salah satu langkah kami untuk mengurangi penyaluran subsidi. Jadi kita berdiskusi dengan Pertamina bagaimana caranya kita pun selaku penyalur itu sedikit kurang menarik untuk jualan premium atau solar. Sehingga *margin* di premium solar itu dikurangi, limpahkan ke yang pertamax dan dexlite. Sehingga kita (suara tidak jelas) teman-teman karena kita kan kalau pengusaha kan *ngitungnya* ya untung rugi bagaimana kan? Ini loh kalau kamu jualan pertamax itu tetap lebih untung. Jadi kita diskusi dengan Pertamina bagaimana caranya *marginnya naikin* saja Pak supaya teman-teman lebih kepingin untuk jualan yang tidak subsidi. Salah satu langkah kami seperti itu.

Terus tadi mungkin dijawab (suara tidak jelas) bagaimana Pertamina memberlakukan Hiswana Migas, begitu Pak ya. Jadi pada dasarnya sih, iya kalau kita kerja sama dengan *principle* dengan distributor. *Principle* dimana-mana pasti menang, begitu Pak ya. Terus yang kedua, sekitar 10 tahun ini Pertamina punya anak-anak perusahaan yang juga bekerja yang sama dengan kita. Jadi kaya SPBU Pertamina punya Pertamina Retail. (suara tidak jelas). terus untuk penyaluran BBM industri itu Pertamina juga punya Pertamina Patra Niaga. Saya kerja di sub holdingnya itu. Anak Pak.

(suara tidak menggunakan mic)

Nah itu yang kadang-kadang terus terang posisi kita kadang-kadang iya agak sedikit bergeseran dengan anak perusahaan. Jadi kaya di angkutan itu seluruh angkutan itu sekarang di bawah Patra Niaga. Jadi anggota-anggota kami tidak langsung ke Pertamina tapi ke Patra Niaga. Lebih kurang seperti itu. Patra Niaga juga punya kerjaan yang sama.

F-P. GOLKAR (M. MISBAKHUN, S.E., M.H):

(suara tidak menggunakan mic)

RACHMAD MUHAMADIYAH (KETUA UMUM HISWANA MIGAS):

Jadi lebih kurang itu kondisi kita. Terima kasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Rachmad Muhammadiyah, Bapak Heddy dan Pak Happy Heryawan sudah memberikan masukannya pada siang hari ini.

Saya pikir ini karena masih sesi pendalaman Pak. Jadi mungkin nanti kalau memang masih diperlukan, kami akan mengundang Bapak-bapak kembali, ataupun juga bisa juga kami menyampaikan pertanyaan secara tertulis kepada bapak untuk dijawab. Begitu pula dengan Bapak Hiswana Migas kalau ada informasi-informasi atau data-data penting yang sekiranya nanti berkaitan dengan efektivitas subsidi energi ini, kan *goal* nya adalah bagaimana subsidi energi yang menggunakan uang negara ini benar-benar dirasakan oleh rakyat. Itu yang tadi kata Pak Misbakhun tadi, bagaimana kita menuju kesejahteraan.

Kalau kira-kira Hiswana Migas ini punya data informasi atau saran dan masukan yang kira-kira bisa membuat terkait subsidi ini menjadi lebih efektif dan (suara tidak jelas) tolong Pak disampaikan kepada Sekretariat BAKN supaya nanti menjadikan bagian dari (suara tidak jelas) dalam rekomendasi yang akan disampaikan.

Saya pikir demikian Rapat Dengar Pendapat Umum kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas nama Pimpinan BAKN dan anggota kepada Hiswana Migas yang telah berkenan untuk hadir pada sore hari ini. Terima kasih, saya akhiri *alhamdulillah*.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.38 WIB)